

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI GENERAL DAN TEMATK PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023

A. RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI GENERAL

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Total	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
A. SS 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif															
1	Penyederhanaan Birokrasi	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	88	100	Penyesuaian penyederhanaan birokrasi sesuai regulasi	Persentase	Persentase penyederhanaan struktur organisasi	88	-	-	12	100	-	Bagian Organisasi	DPMPTSP dan Balitbang
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi	N/A	10	Piloting Implementasi Sistem Kerja Baru	Jumlah	Perangkat Daerah yang telah menerapkan Sistem Kerja	-	-	-	10	10	-	Bagian Organisasi	DPMPTSP, Disnaker, Disdag, Setda, Ketapang, Bappeda,
			36	36	Penyesuaian Proses Bisnis dan SOP Perangkat Daerah sesuai penyederhanaan birokrasi	Jumlah	Perangkat Daerah yang telah menyusun Probis dan SOP yang sesuai dengan SOTK hasil penyederhanaan birokrasi	-	-	-	36	36	-	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
3	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Transformasi Layanan Digital	N/A	11,558	Penerbitan Tanda Tangan Elektronik dan E-Mail Dinas untuk ASN	Orang	ASN yang telah memiliki Tanda Tangan Elektronik	600	600				21.000.000	Dinas Kominfo	Seluruh Perangkat Daerah
					melaksanakan identifikasi pelayanan publik digital dan non digital	%	Pelayanan publik yang sudah digital								

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Total	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana	
					Monitoring pelayanan publik digital dan non digital	Jumlah	pelayanan publik yang dimonitoring							DPMPTSP	Seluruh Unit Pelayanan	
		Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	N/A	100	Penguatan tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Persentase	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100 % (aduan 37 diselesaikan 37)	100% (aduan) 65 diselesaikan 65)					Dinas Kominfo	Perangkat Daerah	
4	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,45	3,12	Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Perencanaan SPBE	Dokumen	Jumlah dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Perencanaan SPBE			1		1	622.386.000	Dinas Kominfo	Seluruh Perangkat Daerah	
					Melaksanakan penilaian mandiri SPBE	Indeks	Hasil penilaian mandiri SPBE							Dinas Kominfo	Tim Penilai	
					melaksanakan integrasi aplikasi	jumlah	aplikasi yang terintegrasi							Dinas Kominfo	Tim Teknis	
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	3	Penyusunan Arsitektur SPBE	jumlah	Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan								Dinas Kominfo	Tim Penyusun
					Menyusun Peta Rencana SPBE	jumlah	Manajemen risiko SPBE yang ditetapkan							Dinas Kominfo	Tim Penyusun	
					Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE	Persen	Persentase terlaksananya Kebijakan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE				100	100				

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Total	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
					Monitoring pemeliharaan jaringan dan aplikasi	jumlah	Monitoring pemeliharaan jaringan dan aplikasi yang dilaksanakan							Dinas Kominfo	Tim Teknis
5	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	36,23	41,66	Melakukan workshop Teknis terkait Digitalisasi Arsip elektronik (SIAP ADAMA)	Orang	Meningkatnya kompetensi pengelola arsip statis dengan sistem digitalisasi Arsip Elektronik		100				26.596.000,00	Dinas Kearsipan	Dinas Kearsipan
					Pengelolaan Arsip Elektronik bagi Tokoh Masyarakat Lorong Wisata (BINAR POKMAS)	Orang	Meningkatkan kompetensi pengelola arsip terkait sistem digitalisasi arsip elektronik		100				53.014.000,00	Dinas Kearsipan	Dinas Kearsipan
					Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)	Orang	Meningkatkan kompetensi pengelola arsip terkait sistem digitalisasi arsip elektronik		100				144.611.000,00	Dinas Kearsipan	Dinas Kearsipan
6	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Capaian Akuntabilitas Keuangan	N/A	69,60%	Pemuktahiran Data Temuan Tindak Lanjut APIP dan BPK	Persentase	Persentase Tindak Lanjut Temuan				69,60%		350.120.000	Inspektorat Daerah	Perangkat Daerah
					Laporan Realisasi Anggaran	Persentase	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Sebelumnya	100					3.630.263.500	BPKAD	BPKAD
7	Pelaksanaan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A		Penguatan Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan			2			1.301.218.800	Bappeda	Bappeda

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Total	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana	
8	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggara SPIP Terintegrasi	Level	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0			Level 3		217.701.000	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	
					Monitoring penyelenggara SPIP pada seluruh Perangkat Daerah dengan memperhatikan substansi pengendalian intern	Jumlah	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang baik									
					Melaksanakan pembinaan kapabilitas APIP secara berkesinambungan	orang	Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan/bimtek dalam rangka penguatan kapabilitas APIP									
					Menyusun Peraturan tentang Manajemen Risiko	jumlah	Draf Peraturan Wali Kota tentang manajemen risiko									
					Melaksanakan identifikasi, analisis risiko, Rencana Tindak Lanjut, serta pemantauan risiko	Jumlah	Perangkat Daerah yang telah melaksanakan identifikasi risiko									

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Total	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana			
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana		
9	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	37,51	Penguatan Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Persentase	Persentase pemanfaatan SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), e-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat), e-Purchasing (Toko Daring), Non e-Tendering dan Non e-Purchasing, e-Kontrak, dalam proses pengadaan barang/jasa				15,14		5.749.178.100	Bagian Pengadaan barang/jasa	Seluruh Perangkat Daerah		
					Penguatan Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Persentase	Persentase Jumlah Fungsional PBJ				75%					Bagian Pengadaan barang/jasa	Perangkat daerah
					Melaksanakan penilaian mandiri Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan barang/ Jasa (UKPBJ)	Level	Tingkat kematangan UKPBJ				3 level					Bagian Pengadaan barang/jasa	Bagian Pengadaan barang/jasa
10	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	N/A	2,5	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Orang	Jumlah Peserta	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-		78.122.000	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo		

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Total	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
					Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Orang	Jumlah Peserta	-	-	-	1 Kegiatan		43.964.000	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
					Bimbingan Teknis Membangun Metadata Statistik Sektoral	Orang	Jumlah Peserta	-	-	1 Kegiatan	-		145.805.000	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
11	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	30,614.	Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan	Kegiatan	Ditetapkannya program pembentukan peraturan daerah?			2			73.200.000,00	Bagian Hukum	Bagian Hukum
					Penilaian mandiri IKK melalui aplikasi IKK		Laporan hasil penilaian								
12	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Reformasi Hukum	N/A	100	Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi	Kegiatan	Terlaksananya harmonisasi regulasi (perda dan perkada)	4	6	8	8		297.200.000,00	Bagian Hukum	Bagian Hukum
					(menghilangkan overlapping peraturan)										
					Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi	Kegiatan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi produk hukum daerah yang sudah ditetapkan	-	-	5	1		103.200.000,00	Bagian Hukum	Bagian Hukum
					Penguatan sistem regulasi lingkup pemerintah daerah	Kegiatan	Terlaksananya pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	3	3	3	3		83.200.000,00	Bagian Hukum	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Total	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
					Menetapkan perjanjian kinerja JPT, administrator, Pengawas, dan pelaksana	Persentase	Persentase JPT, Administrator, Pengawas dan pelaksana yang menetapkan kinerja								
					monitoring kinerja individu secara berkala	Jumlah	laporan Monev pengelolaan Kinerja Pegawai								
2	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	79,13		Sosialisasi tentang survei penilaian integritas kepada seluruh Perangkat Daerah	Jumlah	Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI)							Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
3	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	66,25	66,25	Sosialisasi/Bimtek Permenpan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN	Orang	Persentase Hasil	100					58.689.500	BKPSDMD	Seluruh Perangkat Daerah
					Sosialisasi PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	Orang		100					57.577.000	BKPSDMD	BKPSDMD
					Sosialisasi Perwali Nilai Dasar dan Pedoman Perilaku ASN	Orang					100		32.097.500	BKPSDMD	BKPSDMD
					Majelis Kode Etik	Orang		5	5	5	5		189.270.000	BKPSDMD	BKPSDMD
					Tambahan Penghasilan Pegawai	Persen		100	100	100	100		372.120.000	BKPSDMD	BKPSDMD

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Total	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
4	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	93,93	93,93	Pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah	Perangkat Daerah yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat			19				Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		Indeks Pelayanan Publik	4,6 / 80,10	5,5 / 84,10	Pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah terhadap kepatuhan penerapan standar pelayanan publik	Jumlah	Perangkat Daerah yang menerapkan standar pelayanan publik			6				Bagian organisasi	Bagian Organisasi

B. RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

No.	Permasalahan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV		Koordinator	Pelaksana
1	Rendahnya Penurunan Angka Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,35	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kegiatan	Pendataan Anak Tidak Sekolah Jenjang SD (Anak Makassar Bersekolah)	-	-	-	1	43.800.000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Siswa	Jumlah Siswa yang mendapat Beasiswa Anak Lorong Jenjang SD	-	-	-	1.400	2.520.000.000		
					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kegiatan	Pendataan Anak Tidak Sekolah/ Putus Sekolah Jenjang SMP Se-Kota Makassar	-	-	-	1	42.658.000		
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Siswa	Jumlah Siswa yang mendapat Beasiswa Anak Lorong Jenjang SMP	-	-	-	600	1.080.000.000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan yang terselenggara	-	2	2	2	793.752.000		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Orang	Jumlah Ibu Hamil KEK, Anak Sekolah, Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang yang mendapatkan PMT		40 Balita Gizi Buruk, 5650 PMT Gizi Kurang	350 Bumil KEK, 760 Anak Sekolah		6.280.346.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat, Vaksin	Jenis	Jumlah Jenis Obat, Vaksin yang disediakan		111			1.752.266.250	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Orang	Bantuan iuran integrasi peserta gratis JKN/PBPU		255.418	255.418	255.418	136.926.552.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
							Bantuan iuran pekerja bukan penerima Upah (PBPU) Kelas 3 aktif		170.000	170.000	170.000			
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas	Jumlah Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	47	47	47	47	2.512.209.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan					
Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang				20	41.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial					

	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah Orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota		268			407.580.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota				100	394.362.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Sertifikat	Jumlah Sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)				100	118.490.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Penyediaan Permakanan	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				200	350.250.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Penyediaan Sandang	Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				200	51.900.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Penyediaan Alat Bantu	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				28	100.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50	115.906.250	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				200	324.004.500	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				200	49.813.600	Dinas Sosial	Dinas Sosial

	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				200	9.600.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				30	90.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				200	63.560.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				200	978.185.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50	2.800.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Pemberian Layanan Rujukan	Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				75	63.162.500	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				100	42.399.600	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				100	214.039.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Penyediaan Permakanan	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100	4.800.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial

	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				300	2.278.795	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota				120	230.789.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				20	4.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				40	59.162.500	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Pemberian Layanan Rujukan	Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				25	35.850.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Orang	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota			200		149.850.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				30.000	1.212.402.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				30.000	116.770.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				100	2.766.640.400	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Fasilitasi Bantuan Sosial Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			100		252.313.600	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Penyediaan Makanan	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1				4000	5.238.605.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial

			Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Penyediaan Sandang	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100	36.125.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				3	12.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial	
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				100	40.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				300	17.770.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Orang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				150	95.810.400	Dinas Sosial	Dinas Sosial	
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	7 Lokasi	Jumlah SPAM di Kawasan Perkotaan yang dibangun		1	3	3	7.031.632.300	Dinas PU	Dinas PU	
228	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung	Kelompok	Jumlah Kelompok Tani yang dibina	50	60	70	48	938.584.797	Dinas Perikanan dan Pertanian	Dinas Perikanan dan Pertanian	
	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	60	240	240	24	2.520.312.000	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan	
	Pelayanan antar Kerja	Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	3500				96.077.500	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan	

	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100				25.269.000	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Orang	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD			100		69.828.200	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
	Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		80	129		1.370.162.980	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Unit	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang mendapat perbaikan	-	0	0	23	1.460.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Ormas	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kota Makassar Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang dilaksanakan		40	12		309.221.500	Dinas Pengendalian Penduduk & KB	Dinas Pengendalian Penduduk & KB
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung LB	Kampung	Jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	4	4	4	3	2.063.848.600	Dinas Pengendalian Penduduk & KB	Dinas Pengendalian Penduduk & KB
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kampung	Jumlah Kampung KB yang mendapat Pembinaan Terpadu	1	1	1		2.276.408.000	Dinas Pengendalian Penduduk & KB	Dinas Pengendalian Penduduk & KB
	Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	-	1	-	1	72.830.000	Dinas Kependudukan dan Capil	Dinas Kependudukan dan Capil
200 Orang	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota	Keluarga	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Kota Makassar yang Dilaksanakan		200 Orang			56.200.000	DPPPA	DPPPA

				2 Dok/5 Lorong	Pengembangan Komunikasi informasi dan edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Lorong	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kota Makassar yang dikembangkan			2 Dok/5 Lorong		145.436.000	DPPPA	DPPPA
				550 Unit Usaha	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti Kegiatan Keterampilan Berbasis Kompetensi	10	270	200	70	1.281.939.000	Dinas Koperasi & UKM	Dinas Koperasi & UKM
				40 Unit Usaha	Fasilitasi Kemudahan perizinan Usaha Mikro	UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitasi Kemudahan Perizinan	0	20	15	5	260.149.000	Dinas Koperasi & UKM	Dinas Koperasi & UKM
				410 Unit Usaha	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	UMKM	Jumlah Peserta Pengembangan Potensi Produk UMKM dan Perkembangan Wirausaha Baru di Lorong - Lorong Kota Makassar	0	200	210	0	150.579.000	Dinas Koperasi & UKM	Dinas Koperasi & UKM
				940 Unit Usaha	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koperasi	Jumlah Koperasi yang Terfasilitasi Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40	400	400	100	2.587.316.000	Dinas Koperasi & UKM	Dinas Koperasi & UKM
2	Iklim Investasi yang tidak Kondusif untuk Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	Peningkatan Nilai Investasi	5 layanan sistem	Optimalisasi manajemen layanan perizinan mengguakan teknologi informasi	Sistem	Tersedianya Portal layanan perizinan yang terintegrasi yang mudah diakses			5		100.000.000	DPMPTSP	DPMPTSP
1 peta potensi investasi				Penyusunan Peta Potensi Investasi	Dokumen	Penyusunan Peta Potensi Investasi dan Ipro				1	401.147.000	DPMPTSP	DPMPTSP	
300 Pelaku usaha				Klinik LKPM	Pelaku usaha	Jumlah Pelaku usaha yang terlayani			25	275	101.003.000	DPMPTSP	DPMPTSP	
4 layanan sistem				Sistem Informasi Pengendalian Penanaman Modal	Sistem	Tersedianya aplikasi SIPANA'MAMO				4	100.000.000	DPMPTSP	DPMPTSP	

3	Tingginya Angka Stunting Belum adanya sistem informasi stunting yang terintegrasi	Pelaksanaan implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting (Digitalisasi Administrasi Pemerintahan) Terwujudnya pemanfaatan Sistem Informasi Stunting yang Terintegrasi)	Prevalensi Stunting		Digitalisasi stunting (aplikasi stunting)	1	Unit				1	100.000.000	DPPKB	DPPKB
4		Pelaksanaan Pengendalian Inflasi	Tingkat Inflasi	4,87	Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting	Persen	Persentase Barang Kebutuhan Pokok dengan harga stabil (4 jenis)	0,45	0,45	0,45	0,45	89.971.000,00	Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan
							Persentase barang penting dengan harga stabil (2 jenis)	0,76	0,77	0,77	0,77	1.361.516.400,00	Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan
5		Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat penggunaan produk dalam negeri	43%	Forum Dagang peningkatan pemasaran produk lokal Makassar	400 orang	Cakupan Bina Pelaku Usaha	0	200	200	0	486.840.000,00	Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan
					Workshop penyusunan roadmap dan monev P3DN dan PBJ Pemda	100 orang	Cakupan admin P3DN SKPD	0	0	50	50	123.813.000,00	Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan